

LAPORAN SINGKAT KOMISI I DPR RI
(KEMENTERIAN PERTAHANAN, KEMENTERIAN LUAR NEGERI, KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, TENTARA NASIONAL INDONESIA, BADAN INTELIJEN NEGARA, BADAN SIBER DAN SANDI NEGARA, LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL, BADAN KEAMANAN LAUT, DEWAN KETAHANAN NASIONAL, LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA, LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK TELEVISI REPUBLIK INDONESIA, DEWAN PERS, KOMISI PENYIARAN INDONESIA PUSAT, KOMISI INFORMASI PUSAT, LEMBAGA SENSOR FILM, DAN PERUM LKBN ANTARA)

- Rapat ke : 27 (dua puluh tujuh)
Tahun Sidang : 2019-2020
Masa Persidangan : IV
Jenis Rapat : Rapat Dengar Pendapat (RDP) Panitia Kerja (Panja) Pelindungan WNI dan Kinerja Perwakilan di Luar Negeri terkait Pandemi Global Covid-19 Komisi I DPR RI dengan Direktur Jenderal Protokol dan Konsuler (Dirjen Protkons) Kemlu R.I., Pejabat Markas Besar TNI Angkatan Darat (MABESAD), dan Pejabat Markas Besar TNI Angkatan Laut (MABESAL)
- Hari, Tanggal : Selasa, 7 Juli 2020
Pukul : 10.00 WIB
Sifat Rapat : Terbuka
Pimpinan Rapat : Utut Adianto, Ketua Panja Pelindungan WNI dan Kinerja Perwakilan di Luar Negeri terkait Pandemi Global Covid-19 Komisi I DPR RI (Wakil Ketua Komisi I DPR RI)
- Sekretaris Rapat : Suprihartini, S.I.P., M.Si., Kabagset. Komisi I DPR RI
Tempat : Ruang Rapat Komisi I DPR RI, Gedung Nusantara II Lt. 1, Jl. Jenderal Gatot Soebroto, Jakarta 10270
- Acara : 1. Penjelasan Dirjen Protkons Kemlu R.I. mengenai:
a. Langkah diplomasi strategis pelindungan WNI dan Badan Hukum Indonesia (BHI) di Luar Negeri di masa pandemi Covid-19;
b. Kebijakan strategis di bidang pelindungan WNI dan BHI di luar negeri di masa pandemi Covid-19;
c. Pelaporan di bidang pemantauan, pelindungan, evakuasi WNI dan BHI di luar negeri;
d. Alokasi dan kebutuhan anggaran penanganan pandemi Covid-19 terutama bagi pelindungan WNI dan BHI di luar negeri.
2. Penjelasan Pejabat MABESAD dan MABESAL mengenai:
a. Peran dan langkah TNI di perbatasan dalam pelindungan WNI dan pencegahan penyebaran Covid-19;
b. Langkah strategis penanganan pandemi Covid-19 di wilayah perbatasan.
- Hadir : 1. orang dari 30 Anggota Panja Komisi I DPR RI

2. a. Dirjen Protkons Kemlu R.I., Andy Rachmianto;
 - b. MABESAD dihadiri oleh Asops Kasad, Mayjen TNI Surawahadi, S.IP., M.Si.;
 - c. MABESAL dihadiri oleh Asops Kasal, Laksamana Muda Didik Setiyono, S.E., M.M.;
- beserta jajaran.

I. PENDAHULUAN

1. Sesuai dengan ketentuan Pasal 281 ayat (1) dan Pasal 276 Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib, Ketua Rapat membuka Rapat pada pukul 10.18 WIB dan dinyatakan terbuka untuk umum.
2. RDP Panja Pelindungan WNI dan Kinerja Perwakilan di Luar Negeri terkait Pandemi Global Covid-19 Komisi I DPR RI dengan Dirjen Protkons Kemlu R.I., Pejabat MABESAD, dan Pejabat MABESAL secara tatap muka pada hari Selasa, tanggal 7 Juli 2020 dengan acara dan waktu sebagaimana tersebut di atas, dipimpin oleh Utut Adianto, Ketua Panja Pelindungan WNI dan Kinerja Perwakilan di Luar Negeri terkait Pandemi Global Covid-19 Komisi I DPR RI (Wakil Ketua Komisi I DPR RI)

II. CATATAN

1. Panja telah mendengarkan paparan Kemlu terkait dengan langkah strategis pelindungan WNI di Luar Negeri dalam Pandemi Global COVID-19, dan paparan Mabes TNI-AD serta Mabes TNI-AL terkait langkah strategis pelindungan WNI dan pencegah penyebaran COVID-19 di wilayah perbatasan.
2. Panja meminta laporan tertulis dari Kemlu :
 - a. Perkembangan informasi, data, dan kebijakan pelindungan dan penanganan WNI di Luar Negeri di masa pandemi COVID-19
 - b. Alokasi anggaran yang tersedia pada Perpres Nomor 54 Tahun 2020 dan kebutuhan alokasi minimal pada tahun 2020 untuk pelindungan WNI di luar negeri di masa pandemi COVID-19.
 - c. Alokasi anggaran pada Pagu Indikatif RKA RAPBN TA 2021 serta kebutuhan alokasi anggaran minimal pada RKA RAPBN TA 2021 untuk pelindungan WNI di luar negeri di masa pandemi COVID-19.
3. Panja meminta laporan tertulis dari Mabes TNI-AD dan Mabes TNI-AL :
 - a. Perkembangan informasi, data, dan kebijakan pelindungan dan penanganan WNI di perbatasan di masa pandemi COVID-19.
 - b. Alokasi anggaran yang tersedia pada Perpres Nomor 54 Tahun 2020 dan kebutuhan alokasi minimal pada tahun 2020 untuk pelindungan WNI di masa pandemi COVID-19 di wilayah perbatasan.

- c. Alokasi anggaran pada Pagu Indikatif RKA RAPBN TA 2021 serta kebutuhan alokasi anggaran minimal pada RKA RAPBN TA 2021 untuk perlindungan WNI di masa pandemi COVID-19 di wilayah perbatasan.

Sebelum berakhirnya Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2019-2020, Panja akan menjadwalkan RDP dengan Dirjen Imigrasi Kemkumham dan Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran (BPMP) terkait dengan:

1. Penjelasan Dirjen Imigrasi Kemkumham mengenai:
 - a. Penerapan Protokol Kesehatan di Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) di masa Pandemi Covid-19
 - b. Kebijakan dan pelaksanaan Pengawasan Orang Asing (POA) di masa pandemi Covid-19
2. Penjelasan Kepala BP2MI mengenai:
 - a. Kebijakan nasional Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI) secara terpadu di masa pandemi Covid-19
 - b. Langkah strategis BP2MI dalam pelindungan PMI yang rentan dan terdampak Pandemi Covid-19
 - c. Dukungan BP2MI dalam proses repatriasi PMI akibat dampak Covid-19.

III. PENUTUP

Rapat ditutup pukul 13.30 WIB.

Jakarta, 7 Juli 2020

KETUA RAPAT,

UTUT ADIANTO
A-194